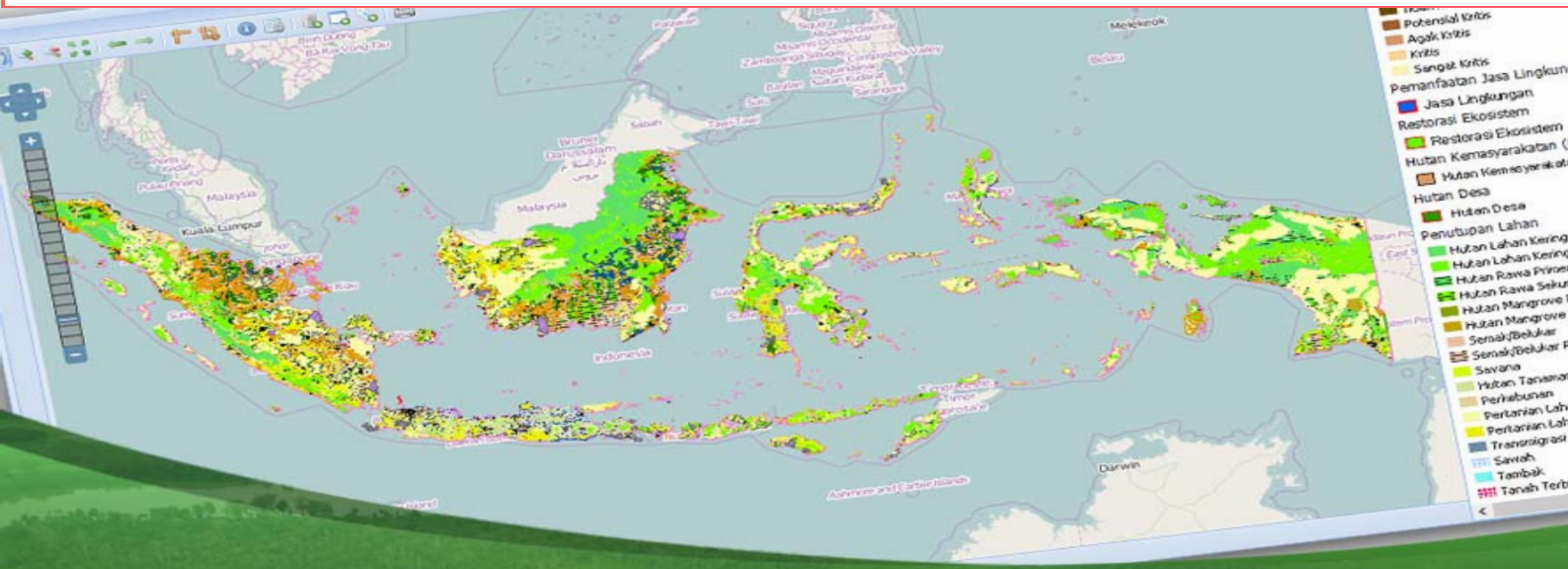




RENCANA KERJA

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

TAHUN 2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019, dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Jakarta, November 2018

Plt. Direktur,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.

NIP. 196004111987031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi dan SDM.....	3
E. Tujuan.....	5
F. Capaian Tahun 2017	6
G. Perkiraan Capaian Tahun 2018.....	9
BAB II PERMASALAHAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2019.....	9
A. Permasalahan	11
B. Sasaran Renja Tahun 2019.....	11
BAB III RENCANA KERJA 2019.....	13
BAB IV PENUTUP.....	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 Berdasarkan Golongan.....	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019.....	5
Tabel 4. Jumlah Plot Pelaksanaan Inventarisasi Tahun 2015-2018.....	6
Tabel 5. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH Tahun 2017.....	7
Tabel 6. Progres Kegiatan Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 7. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017.....	9
Tabel 8. Prognosis Capaian Tahun 2018.....	10
Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Tahun 2018 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	11
Tabel 10. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019.....	13
Tabel 11. Rincian Biaya per Unit Indikator.....	15

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	3
Gambar 2.	Diagram Perubahan Jumlah Pegawai tahun 2015-2018.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terkahir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 (*Perubahan*).

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2015-2019 dan Renja Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Tahun 2019 dengan memperhatikan sisa target capaian kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini disusun berdasarkan program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Dokumen Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun 2019, serta alokasi pagu anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan unit kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Memberikan gambaran seluruh unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan teknis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

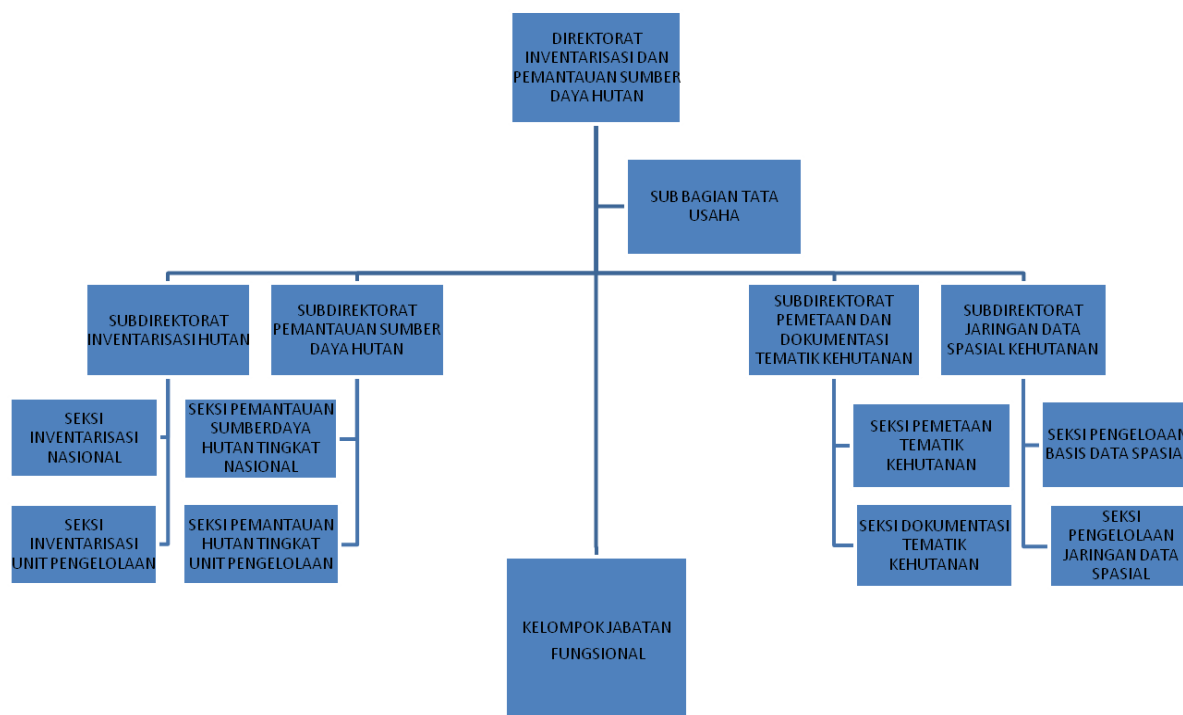
Sebagaimana tujuan utama dari pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 yaitu ***“memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”***, maka telah ditetapkan arah kebijakan guna mendukung tujuan utama tersebut, sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, meningkatkan kebutuhan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prokondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan memepermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur;
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

D. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 Berdasarkan Golongan

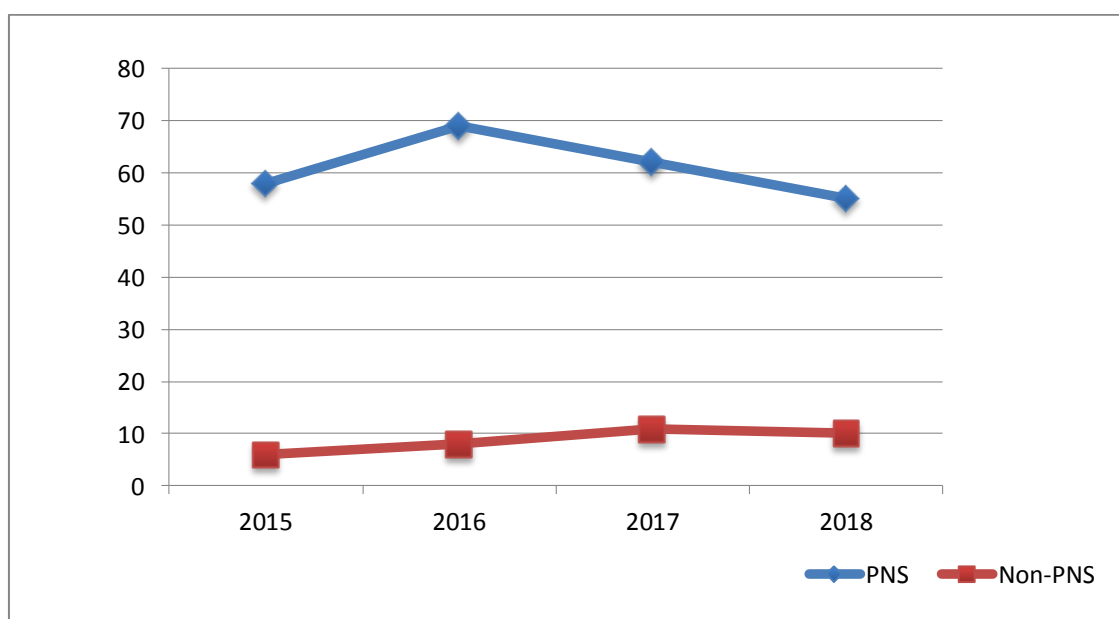
No	Golongan	Jumlah		Ket.
		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Golongan IV	10	6	
2	Golongan III	44	41	
3	Golongan II	8	7	
4	Golongan I	-	-	
5	Tenaga Upah	11	10	
JUMLAH		73	65	

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengalami penurunan jumlah dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang mengalami mutasi dan pensiun.

Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)					SLTP/ SD	JMLH (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA		
1	Direktur	1						1
2	Subdirektorat Inventarisasi Hutan		3			4		7
3	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	2	4		2		9
4	Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan		4	2		3		9
5	Subdirektorat Jaringan Data Spasial		5	3		4		12
6	Subbagian Tata Usaha			3		3		6
7	Jabatan fungsional		2	6	2	1		11
8	Tenaga Upah			8		2		10
	Jumlah	2	16	26	2	19		65

Gambar2. Diagram Perubahan Jumlah Pegawai tahun 2015-2018



E. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan unit kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Memberikan gambaran seluruh unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan teknis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan melaksanakan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan 2 (Dua) sasaran kegiatan.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target
Tersedianya dan termutakhirkannya Data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan peta SDH Nasional	34 Provinsi
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 Persen
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	1 Layanan

F. Capaian Tahun 2017

Untuk menyusun perencanaan unit kegiatan Tahun 2019, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan unit kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran unit kegiatan yang akan dilaksanakan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional

Inventarisasi sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan enumerasi dan reenumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menduga potensi hutan nasional. Sebagai pelaksana kegiatan adalah BPKH Wilayah I sampai dengan XXII.

Dalam Renstra 2015-2019 ditargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 1650 klaster. Target tersebut terbagi merata setiap tahun sehingga ditargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 330 klaster per tahun. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, pada Rencana Kerja tahun 2017 hanya ditargetkan sebanyak 96 plot. Dari target tersebut dapat dilaksanakan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 96 plot. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 yang dapat melaksanakan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 131 plot dan tahun 2015 sebanyak 299 plot.

Jumlah plot yang sudah diinventarisasi selama periode renstra 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Plot Pelaksanaan Inventarisasi Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Plot	299	131	96	-

2. Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan, 600 KPH

Buku Data dan Informasi Potensi KPH Tahun 2017 disusun berdasarkan target Renstra Direktorat Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan dan Renja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Data dan Informasi Potensi yang disusun untuk tahun 2017 terdiri dari 100 KPH dengan rincian 82 KPHK, 10 KPHL dan 8 KPHP yang meliputi gambaran umum KPH,

wilayah pengelolaan dan potensi dari KPH. Mengingat kegiatan fasilitasi KPH baru dilaksanakan pada sebagian KPH, maka kelengkapan dan kedetailan data dan informasi potensi KPH yang disajikan dalam Buku Data dan Informasi Potensi KPH Tahun 2017 juga bervariasi. Data dan informasi tersebut akan diperbaharui setiap tahun sesuai perkembangan ketersediaan data.

Tabel 5. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH Tahun 2017

No.	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH KPH	100 KPH	100 KPH	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran					100

Tabel 6. Progres Kegiatan Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH Tahun 2015-2019

Tahun	Target Renstra (KPH)	Target Renja (KPH)	Realisasi (KPH)
2015	258	258	234
2016	100	100	102
2017	100	100	100
2018	-	-	-
2019 (update)	-	-	-

3. Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, Direktorat IPSDH ditetapkan sebagai unit kliring data spasial lingkup KLHK mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG. Selain itu pada tahun 2016 Dit. IPSDH ditunjuk sebagai koordinator kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lingkup KLHK, dimana KLHK mendapat tugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan peta tematik sebanyak 9 tema dari 85 tematik (Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yaitu :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
7. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000

Tahun 2017 Kementerian LHK bertanggung jawab terhadap 8 Tema, karena tematik Peta Zonasi Kawasan Konservasi perairan sudah selesai pada tahun 2016. Untuk penilaian pada tahun 2017, Peta Zona KK perairan yang sudah mendapat nilai 100 digabung masuk ke Tema Peta Zonasi Kawasan Konservasi.

Berkenaan dengan adanya Surat Sekretaris Tim PKSP No. S-201/D.VI.M.EKON/11/2017 Tanggal 3 November 2017, pelaksanaan KSP tahun 2018 KLHK mendapat tambahan tugas 1 tema yaitu pembuatan peta Hutan Adat.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan koordinasi ke walidata yang terkait, BIG, BPKH dan instansi lain di daerah, serta ground check (7 lokasi), mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Hasil capaian pelaksanaan percepatan KSP tahun 2017 lingkup KLHK sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) 19 provinsi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) 12 provinsi (6 provinsi wilayah Sumatera dan 6 provinsi wilayah Sulawesi).
3. Update Peta Hutan Tanaman Rakyat (28 provinsi)
4. Update Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) (21 provinsi)
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 34 provinsi
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 16 provinsi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan 3 provinsi wilayah Kalimantan.
7. Update Peta Penunjukan Kawasan Hutan (34 provinsi)
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional 14 provinsi.

Dalam rangka penyebaran informasi mengenai pengelolaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2017 telah disusun buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2017, leaflet serta beberapa media publikasi lainnya seperti : tali name tag, bag. Penyusunan buku basis data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuannya adalah untuk mempublikasikan informasi basis data spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk buku sehingga pengguna yang dapat memanfaatkan basis data geospasial kehutanan menjadi semakin luas.

Capaian Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	Nasional (34 Provinsi)	Nasional (34 Provinsi)	100
	Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
<i>Rata-rata pencapaian Sasaran Kegiatan</i>				100

G. Perkiraan Capaian Tahun 2018

Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Invenarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 dimonitor dan di evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.

Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) tahun 2018 sampai bulan Desember 2018 untuk mendukung Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 8. Prognosis Capaian Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2018	Capaian 2018	%
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
Terlaksananya Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian Target Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)	Data Citra Resolusi Fungsi untuk Pencapaian Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Dirketorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	1 Layanan	1 Layanan	100
Prognosis Capaian Tahun 2018				100

BAB II

PERMASALAHAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2019

A. Permasalahan

Dalam mencapai sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan ditemukan beberapa permasalahan bidang teknis maupun non-teknis. Permasalahan terkait Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan antara lain:

1. Perencanaan startegis belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pencapaian sasaran kegiatan;
2. Terbatasnya dukungan anggaran dan sarana/prasarana dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
3. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan trampil dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Sasaran Renja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan utama pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan 2015-2019 yakni memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, kegiatan prioritas Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 adalah Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan dengan 2 (Dua) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Dirketorat Inventarsiasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untk menjamin kinerja yang optimal

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Tahun 2018 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target
Inventarisasi dan Pemanatuan Sumber	Tersedianya dan termutakhirkannya	Data dan peta SDH Nasional	34 Provinsi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target
Daya Hutan	Data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 Persen
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Dirketorat Inventarsiasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untk menjamin kinerja yang optimal	Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	1 Layanan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, unit kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 meliputi:

1. Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional, 7 elemen kegiatan;
2. Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional, 5 elemen kegiatan;
3. Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH, 2 elemen kegiatan;
4. Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional, 6 elemen kegiatan;
5. Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), 4 elemen kegiatan;
6. Layanan Perkantoran, 1 Layanan ; dan
7. Layanan Internal Organisasi, 3 Kegiatan

BAB III

RENCANA KERJA 2019

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 merupakan uraian rinci serta penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2015-2019.

Elemen kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya target Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan tahun 2019 meliputi:

Tabel 10. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Sasaran Unit Kegiatan	Target 2019	Kegiatan Rinci
Tersedianya dan termutakhirkannya Data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan peta SDH Nasional	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	001 Penyusunan NSDH Nasional
				002 Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan
				003 Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional
				004 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi
				005 Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional
				006 Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional
				007 Pembuatan Peta NSDH
Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional			34 Provinsi	001 Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional
				002 Update data penutupan lahan tingkat nasional
				005 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh
				004 Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi
				005 Update Penafsiran KPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Sasaran Unit Kegiatan	Target 2019	Kegiatan Rinci
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan pada KPH	600 KPH	001 <i>Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)</i> 002 <i>Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH</i>
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	001 <i>Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia</i> 002 <i>Penghitungan Deforestasi Indonesia</i> 003 <i>Penelaahan Peta Tematik Kehutanan</i> 004 <i>Dokumentasi Data dan Peta</i> 005 <i>Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan</i> 006 <i>Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</i>
		Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	001 <i>Pengelolaan Basis Data Spasial LHK</i> 002 <i>Pengelolaan Jaringan Data Spasial</i> 003 <i>Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike</i> 004 <i>Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</i>
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Dirketorat Inventarsiasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untk menjamin kinerja yang optimal	Terlaksananya Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Layanan 1 Kegiatan	001 <i>Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)</i> 001 <i>Penyusunan Rencana Kegiatan bidang IPSDH</i> 002 <i>Dukungan manajemen rencana kegiatan dan anggaran lingkup Direktrat IPSDH</i> 003 <i>Koordinasi kegiatan bidang IPSDH</i>

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 adalah sebesar **Rp 4.630.325.000,-** (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), rincian biaya per-Unit Indikator tertuang pada Tabel 5.

Tabel 11. Rincian Biaya per Unit Indikator

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Indikator Unit Kegiatan	Target 2019	Jumlah Biaya (Rp.)
Tersedianya dan termutakhirannya Data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan peta SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	763.600.000
		Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	620.232.000
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	600 KPH	257.200.000
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	689.884.000
		Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	689.884.000
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Dirketorat Inventarsiasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untk menjamin kinerja yang optimal	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1.609.525.000
		Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1 Kegiatan	
Jumlah				4.630.325.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2018 merupakan acuan bagi seluruh Sub Direktorat dan Sub Bagian lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam menyusun Rencana Kerja (RKA) tahun 2019.

Seluruh komponen dan sub komponen yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2019 harus berdasarkan kepada Elemen Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan alokasi anggaran untuk Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan yang akan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam pemanfaatan serta dapat mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MATRIKS RINCIAN RENCANA KERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2019	Kegiatan Rinci	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Data dan Informasi SDH yang terbarukan di seluruh KPH	Data dan Peta SDH mendukung Pengalokasian KH	34 Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi	34 Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	001 Penyusunan NSDH Nasional	
			Potensi SDH Nasional		Potensi SDH Nasional		Potensi SDH Nasional		002 Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan	
									003 Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	
									004 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	
									005 Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional	
									006 Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	
									007 Pembuatan Peta NSDH	
				Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	001 Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional
									002 Update data penutupan lahan tingkat nasional	
									005 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	
									004 Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi	
									005 Update Penafsiran KPH	
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	600 KPH (Update)		Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan	600 KPH (Update)	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan	600 KPH (Update)	001 Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)
										002 Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH
Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi		Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	001 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	
									002 Penghitungan Deforestasi Indonesia	
									003 Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	
									004 Dokumentasi Data dan Peta	
									005 Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2019	Kegiatan Rinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	006 Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 001 Pengelolaan Basis Data Spasial LHK 002 Pengelolaan Jaringan Data Spasial 003 Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike 004 Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran	12 Bulan/Layanan	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	12 Bulan/Layanan	Terlaksananya Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan Perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan Perkantoran (Operasional)	12 Bulan/Layanan	001 Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
	Layanan Internal organisasi	1 Kegiatan	Layanan Internal organisasi		Terlaksananya layanan internal organisasi (Good Governance) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Layanan Internal organisasi	1 Kegiatan	001 Penyusunan Rencana Kegiatan bidang IPSDH 002 Dukungan manajemen rencana kegiatan dan anggaran lingkup Direktrat IPSDH 003 Koordinasi kegiatan bidang IPSDH